

Target PAD 2025 Ditetapkan Rp240 Miliar

PENAJAM - Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Hadi Saputro mengungkapkan bahwa meskipun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan belum tercapai pada tahun 2024, ada beberapa jenis pajak yang melampaui target yang ditetapkan. Dari 11 jenis pajak yang ada, sebanyak 8 jenis pajak berhasil mencapai target yang lebih tinggi dari yang diharapkan.

"Secara keseluruhan PAD kita belum tercapai tapi banyak yang melampaui target. Dari 11 jenis pajak, 8 jenis pajak melebihi target sementara 4 jenis lainnya tidak tercapai," jelas Hadi, Selasa (1/4/1).

Namun, ada beberapa kendala yang menyebabkan empat jenis pajak tidak tercapai. Pertama, untuk pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), ketidak tercapainya target disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang memberikan pembebasan BPHTB untuk investasi di Ibu Kota Negara (IKN).

Kedua, pajak batuan MBLB tidak tercapai karena dua perusahaan yang terlibat belum mendapatkan perpanjangan izin dan belum dapat memproduksi batuan yang menghambat pencapaian target.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan PTSP provinsi untuk akselerasi perizinan," kata Hadi.

Jenis pajak lainnya yang tidak tercapai adalah pajak air bawah tanah yang dipengaruhi oleh beberapa perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi. Selain itu, pajak walet juga mengalami penurunan terkait dengan migrasi burung walet dan penurunan harga pasar.

"Walet itu kecil tapi migrasinya menjadi isu dan harga burungnya juga turun," tambah Hadi.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Bapenda PPU sudah melakukan berbagai upaya. Untuk MBLB, koordinasi dengan instansi terkait seperti PTSP akan terus dilakukan agar proses perizinan dapat dipercepat.

"Kami akan berkoordinasi agar ada pendampingan dari daerah dalam pengurusan perizinan," ujar Hadi Saputro.

Untuk pajak air bawah tanah, pihak Bapenda akan melakukan survei dan pendataan ulang untuk mengupdate potensi sumber daya air tersebut.

Sedangkan untuk pajak walet, Bapenda belum mengambil langkah besar karena situasi yang sedang menurun. "Kondisinya lagi turun, jadi kita menunggu perkembangan lebih lanjut," kata Hadi.

Sementara itu, terkait dengan BPHTB, Bapenda tengah menghitung ulang potensi baru yang dihasilkan karena adanya rencana pemerintah untuk menghapuskan BPHTB pada skala tertentu di masa depan.

Ke depan, Hadi juga mengungkapkan bahwa target PAD untuk tahun 2025 akan naik menjadi Rp240 miliar dengan target yang lebih tinggi. Bapenda PPU juga berencana untuk menambah jenis pajak opsenrekabe yang akan diterapkan pada tahun tersebut.

"Target 2025 ini akan naik menjadi Rp240 miliar dan kami akan menambah jenis Pajak Opsi Rekapitulasi Baru dan Keberlanjutan (Opsenrekabe) untuk meningkatkan penerimaan daerah," tutup Hadi. (din112/4/sn/fy)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Target PAD 2025 Ditetapkan Rp240 Miliar, 15/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022), pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.